

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|----------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Pos Kota |

Pemprov DKI Raih WTP dari BPK RI

JAKARTA (Poskota) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun 2023. Dari laporan yang dipaparkan BPK, Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan itu disampaikan langsung Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7). Sidang, dihadiri Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono.

"Berdasarkan analisis dampak-dampak permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah termasuk rencana aksi perbaikan yang dilakukan Pemprov DKI, BPK memberikan Wajar Tanpa Pengecualian," kata Ahmadi di DPRD DKI Jakarta.

Meski demikian, BPK masih menemukan bera-



Poskota/Pandi

BPK laporkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun 2023. (Pandi)

gam permasalahan pengelolaan keuangan di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

Pertama aset tetap tanah di lokasi surat izin penunjukkan penggunaan tanah berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung WAST dari

pengembang dan penyelesaian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berlarut-larut.

Kedua, Pemprov DKI Jakarta belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh Jakpro, Bank DKI dan pihak ketiga lainnya, serta potensi pendapatan pe-

manfaat barang milik daerah yang belum didukung.

Lalu ketiga keruangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pengerjaan belum dikenakan denda.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari Pemerintah Pusat. "Kelima, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan," tukas Ahmadi.

Lebih lanjut, atas pencapaian itu, Ahmadi menuturkan Pemprov DKI Jakarta telah mempertahankan opini WTP sebanyak tujuh kali secara berturut-turut.

Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. "Sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan," paparnya. **(Pandi/den)**